

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan organisasi swasta, khususnya organisasi komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor public dikelola tidak untuk tujuan mencari laba. Akuntansi organisasi sektor publik sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi organisasi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah dan berbagai organisasi publik lainnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik.

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bersifat tidak mencari laba. Oleck & Stewart dalam Salusu (2004: 9-10) menyatakan bahwa entitas nirlaba atau dapat disebut juga organisasi nonprofit adalah organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat, atau juga disebut sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungannya sedikit pun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2015). IAI (2015) menyebutkan karakteristik entitas nirlaba antara lain sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut, tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang menjabarkan kinerja dari organisasi tersebut. Laporan keuangan sangat penting dibuat untuk menggambarkan kinerja organisasi dalam suatu periode. Laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang jelas terhadap para penggunanya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter (Fahmi, 2014: 26). IAI (2015) menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberian sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pelaporan keuangan perlu untuk diperhatikan bagaimana penyusunannya sehingga dapat memberikan informasi yang jelas bagi para penggunanya. Oleh karenanya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) sebagai anggota dari *International Federation of Accountants* menyusun mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Laporan keuangan organisasi nirlaba tentu berbeda dengan laporan keuangan organisasi swasta pada umumnya. Perbedaan yang utama ada pada bagaimana cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi nirlaba tersebut. Sumbangan-sumbangan tersebut didapatkan berdasar atas jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut.

Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia: 2018). Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Seharusnya organisasi nirlaba bisa melakukan pencatatan keuangan secara transparan agar bisa mempertanggungjawabkan dana yang didapatkan karena dana yang didapatkan berasal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain. Karena hal itu hendaknya organisasi nirlaba bisa mempertahankan kepercayaan pihak yang sudah

m]emberikan sumbangan dengan cara menyampaikan laporan keuangannya secara terperinci.

Organisasi nirlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun mulai tahun 2019 PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Interpretasi ini diterapkan untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Interpretasi ini diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan. Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (a) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan; dan (b) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid mudah ditemui di Indonesia karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi masjid yaitu, sebagai tempat ibadah, sebagai wadah pengembangan masyarakat, serta sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Masjid juga berperan sebagai lembaga bakti sosial, yang mana masjid dapat menyalurkan sumber daya yang diberikan donatur agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Setiap masjid dikelola oleh seorang takmir yang bertanggung jawab untuk mengelola masjid, baik dari segi perawatan maupun segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan masjid. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, pada umumnya takmir masjid dibantu oleh bendahara masjid. Bendahara masjid bertugas untuk mengelola dana yang diterima dari pemberi sumber daya untuk keperluan operasional

masjid dan keperluan lain terkait dengan kemaslahatan umat. Bendahara masjid juga bertugas untuk melaporkan penggunaan dana yang diterimanya kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kecurigaan penyelewengan dana.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dan *Financial Accounting Standards Boards (FASB)* masjid tergolong organisasi nonlaba. Sebagai organisasi nonlaba, masjid mengelola sumber daya dari masyarakat yang diberikan secara sukarela dan menyalurkannya kepada penerima manfaat. Pengelola masjid bertanggung jawab kepada penerima manfaat yaitu masyarakat di sekitar masjid dan bukan kepada pemberi sumber daya, sehingga apabila masjid melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di sekitarnya dapat disimpulkan bahwa masjid tersebut bersifat akuntabel. Oleh karena masjid adalah organisasi nonlaba dan pada pengelolaan keuangannya bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, maka masjid dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk penilaian pertanggung jawaban dari pengelola masjid atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanahkan kepadanya.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa oleh Nuril Ahda Millatina Yasin dan Sri Dwi Estiningrum pada tahun 2022 dengan judul penelitian Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. Penelitian tersebut dilakukan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa Masjid Al-Muslimun Tulungagung masih melakukan pencatatan keuangannya secara sederhana. Penerimaan dana dicatat sebagai kas masuk sesuai jumlah yang diterima dan pengeluaran kas yang dicatat sebagai kas keluar masing-masing kebutuhan sebesar jumlahnya.

Tahun 2021, Ismi Darojatul Ula, Moh Halim dan Ari Sita Nastiti telah melakukan penelitian pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember dengan judul Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa Masjid Baitul Hidayah Puger Jember melakukan pencatatan administrasi keuangan dibedakan menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sumber daya yang diterima kemudian dilaporkan dan dikelola oleh Pengelola Masjid Baitul Hidayah untuk membiayai belanja renovasi. Penerimaan Pengelola Masjid Baitul Hidayah bersumber dari infaq.

Ayu Yolanda pada tahun 2021 melakukan penelitian pada Masjid Nur Iman Kenagarian Kumango dengan judul penelitian Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Masjid Nur Iman Kenagarian Kumango. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa Masjid Nur Iman Kenagarian Kumango hanya mencatat uang masuk dan uang keluar.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa sebagian besar Masjid di Indonesia masih melakukan pencatatan keuangannya secara sederhana. Pencatatan keuangan dengan metode kas basis, yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Artinya, sebagian besar Masjid di Indonesia belum menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang ISAK 35.

Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin merupakan salah satu entitas nirlaba di kelurahan Pegadungan, kecamatan Kalideres, yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti tertarik untuk menjadikan Masjid ini sebagai objek penelitian, karena Masjid ini aktif dengan berbagai kegiatan antara lain, pengajian rutin senin ba'da isya, dakwah yaumiyah

selasa ba'da zuhur, pengajian bulanan majelis ta'lim kaum ibu selasa pekan ketiga ba'da dzuhur, jam'iyah majelis ratib al athosiyah rabu ba'da isya, ratiban & yasinan kamis ba'da maghrib, jum'at bekam pada jum'at pekan pertama ba'da sholat jum'at, penyediaan makanan gratis setiap ba'da sholat jum'at, bimbingan baca al-qur'an pemula dan tahsin setiap sabtu ba'da isya dan pengajian rutin sabtu ba'da subuh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin karena masjid ini memiliki banyak kegiatan aktif sehingga sudah dipastikan masjid ini menyajikan laporan keuangan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin, bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan bagaimana rekomendasi penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan ISAK 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35?
3. Bagaimana rekomendasi penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.
- c. Untuk mengetahui rekomendasi penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 bagi Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin.

2. Manfaat Penulisan

Dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba serta menunjang untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

b. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin mengenai penyajian laporan keuangan entitas

berorientasi nonlaba sehingga Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin dapat menerapkan ISAK 35 sesuai peraturan yang berlaku.